



Pengembangan Kebijakan Satu Data dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman

Developing One Data Policy in Public Services in Sleman Regency

Moch. Noerizza Triananta¹, Eko Priyo Purnomo²

¹⁻²Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, D. I. Yogyakarta, Indonesia

Penulis Korespondensi: rizza.ananta@gmail.com

Abstrak

Kebijakan Satu Data bertujuan untuk meningkatkan praktik keterbukaan data dengan memastikan ketersediaan data berkualitas tinggi bagi publik melalui portal data terbuka, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Upaya Pengembangan Kebijakan Satu Data dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman dengan menganalisis enam indikator, yaitu: *agenda setting*, analisis masalah, rencana operasional, implementasi, *monitoring*, dan evaluasi. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan sumber data didapatkan dari artikel ilmiah, media massa, dan dokumen peraturan daerah Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *agenda setting*, identifikasi terkait data yang kurang akurat dan kurangnya kepatuhan terhadap kebijakan dengan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia melalui *good governance* dan komunikasi. Analisis masalah menyoroti pentingnya penggunaan data aktual dalam pengambilan keputusan. Rencana operasional Satu Data Kabupaten memudahkan akses layanan pemerintah meskipun penerapannya belum merata karena keterbatasan digital. Implementasi kebijakan Satu Data di Kabupaten Sleman dilakukan dengan membangun komunikasi dan kolaborasi. *Monitoring* dan evaluasi Satu Data Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan kepada masyarakat serta pemberian insentif atau sanksi kepada pelaksana kebijakan digunakan untuk mengatasi hambatan. Rekomendasi pengembangan Satu Data di Kabupaten Sleman dengan penguatan kualitas data, investasi pelatihan SDM, perluasan infrastruktur digital, komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik, sosialisasi kebijakan, dan budaya penggunaan data dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci

Satu Data; Database; Pelayanan Publik; Kabupaten Sleman.

Abstract

The One Data Policy aims to improve data openness practices by ensuring the availability of high-quality data to the public through open data portals, both at the national and regional levels. This research aims to evaluate efforts to develop the One Data Policy in Public Services in the Sleman Regency by analyzing six indicators: agenda setting, problem analysis, operational plans, implementation, monitoring, and evaluation. Qualitative research method with a case study approach with data sources obtained from scientific articles, mass media, and Sleman Regency regional regulatory documents. The research results show that implementing identified agenda-setting is related to inaccurate data and non-compliance with policies by increasing the capacity and quality of human resources through good governance and communication. Problem analysis highlights the importance of using actual data in decision-making. One Data Regency's operational plan facilitates access to government services even though implementation has not been evenly distributed due to digital limitations. Implementing the One Data policy in the Sleman Regency involves building communication and collaboration. Monitoring and evaluating Satu Data Sleman Regency shows that socializing policies to the community and providing incentives or sanctions to policy implementers are used to overcome obstacles. Recommendations for developing One Data in Sleman Regency by strengthening data quality, investing in human resource training, expanding digital infrastructure, better communication and collaboration, socializing policies, and a culture of using data in decision making.

Keywords

One Data; Database; Public Services; Sleman Regency.



DOI: [10.35967/njip.v22i2.600](https://doi.org/10.35967/njip.v22i2.600)

Dikirim: 25 September 2023

Revisi: 26 Desember 2023

Diterima: 30 Desember 2023

© Penulis 2023

Karya ini dilisensikan di bawah lisensi CC BY-NC-SA 4.0. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

1. Pendahuluan

Kebijakan Satu Data merupakan prakarsa Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan interoperabilitas tata kelola data internal pemerintah terhadap praktik-praktik dengan menyediakan kerangka peraturan tentang struktur organisasi (Setiawan & Ikhsanditya, 2020). Namun, sejauh ini belum ada ketentuan untuk mengatur implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (Purnama dkk., 2019). Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019, dengan mengembangkan kebijakan Satu Data dapat membantu pemerintah Indonesia mewujudkan pengendalian pembangunan, akurat, terkini, mudah diakses, dikelola dengan cermat, terintegrasi, dan berkelanjutan (Sekretariat Satu Data Indonesia & Kementerian PPN/Bappenas, 2021). Pada saat yang sama, kebijakan Satu Data berupaya meningkatkan praktik keterbukaan data dengan memastikan ketersediaan data berkualitas tinggi untuk publik melalui portal data terbuka baik di tingkat nasional maupun daerah (Wicaksono, 2016). Karakteristik sektor publik memegang peranan penting dalam masyarakat (Hamrun dkk., 2020). Masalah perkembangan, tingkat kesehatan yang rendah, pendidikan, kesejahteraan finansial dan jaminan sosial yang kuat membutuhkan pelayanan publik bilangan prima (Rizki & Andriyus, 2023).

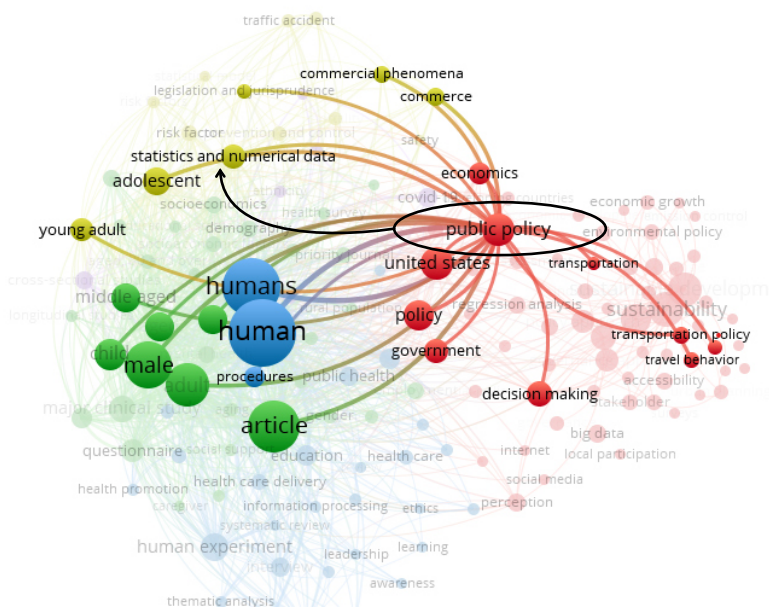
Apabila lembaga publik tidak berubah melakukan pengembangan diri dan terbuka. Masalah pembangunan ini akan menjadi semakin sulit dipecahkan (Widodo, 2017). Mendorong setiap pesanan pemerintah di tingkat pusat daerah di Indonesia Inovasi, lalu pemerintah melalui Kementerian (Dr. Isnaini Rodiyah dkk., 2022). Penerimaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, organisasi kompetisi inovatif pamong praja nasional akan dibagikan nanti untuk kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah terbaik merupakan tujuan untuk menyelenggarakan kompetisi ini Badan Penggerak dan Inovasi. Saat ini, sebagian besar pemerintah Indonesia masih menggunakan data dari survei seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan data riset untuk mengumpulkan data. Di sisi lain, kelemahan survei data adalah pelaporan dari data sebenarnya karena data tidak terjadi secara *real time* sehingga menyimpang dari data sebenarnya. Berdasarkan permasalahan dari beberapa instansi tersebut banyak data yang sering tidak tersedia, data yang berbeda antar unit pemerintahan, dan ketakjelasan mekanisme pengambilan keputusan koordinasi (Mulyanto, 2020).

Kebijakan Satu Data menjadi salah satu kebijakan yang menarik untuk diterapkan pada Sistem Pemerintahan (Kurniasih, 2022). Namun, faktanya masih terdapat daerah yang dianggap gagal dalam menerapkan Kebijakan Satu Data. Hal ini dimungkinkan karena kekurangan pegawai yang ahli di bidang *Information Technology* (IT) serta ketaksetaraan teknologi karena masih adanya keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas teknologi (Farzali dkk., 2012). Selain itu, Jaminan terhadap keamanan dan privasi data yang menimbulkan kekhawatiran pelaksana kebijakan dalam mengumpulkan data pada sistem yang disediakan (Chandra & van Hillegersberg, 2018). Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman telah memulai dalam pengimplementasian Sleman *Smart City*. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No. 20.6 Tahun 2020, pemerintah Kabupaten Sleman menimbang bahwa dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan, sangat membutuhkan data yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggung jawabkan (Khairunnisa & Purnomo, 2020). Satu Data Kabupaten Sleman adalah manifestasi atas upaya pemerintah dalam menyediakan data berkualitas yakni data yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir dengan membangun *database* yang dipergunakan sebagai acuan untuk setiap pengambilan kebijakan publik dan pelaksanaannya (Islami, 2021).

Hambatan yang terjadi pada semua tahapan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Sleman yang meliputi tahap perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan

penyebarluasan data (Maulidya & Rozikin, 2022). Kurangnya regulasi, kesulitan mengintegrasikan data, kapasitas SDM yang kurang memadai, dan kurangnya kesiapan infrastruktur digital (Ardani & Cahyani, 2022). Dengan demikian, Penelitian ini penting dalam meningkatkan penerapan kebijakan satu data di Indonesia khususnya Kabupaten Sleman yang terus dipantau dan dievaluasi untuk menunjang peningkatan kualitas dari program kebijakan satu data yang diterapkan di Indonesia. Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara pemahaman dengan pengembangan kebijakan Satu Data pelayanan publik di Indonesia. Terdapat beberapa hasil yang relevan dengan penelitian ini. Dari data yang didapat dari (Arthur Glenn Maail, 2018) yang berjudul *Understanding Barriers in the Implementation of the One Data Policy in Indonesia: Insights From Health Data Journey Modelling* memberikan hasil kemajuan teknologi digital memudahkan untuk membuat, mengirimkan, menyimpan, mengakses, dan menggunakan informasi yang sangat penting untuk mendukung strategi tata kelola data, di organisasi pemerintah (Fikri dkk., 2023; Khairunnisa dkk., 2022). Mengembangkan standar arsitektur data di seluruh organisasi termasuk memastikan bahwa *metadata* tersedia untuk setiap jenis *dataset*, serta prosedur untuk menjaga akurasi data dan matriks tanggung jawab yang terkait dengan tugas-tugas ini dengan kemungkinan hukuman akan berjalan apabila adanya ketidakpatuhan.

Selanjutnya, dari data kedua yang didapat dari (Ardani & Cahyani, 2022) yang berjudul *Indonesia's One Data Policy Challenge: A Case Study on the Death and Cause of Death Registration System in Jakarta* memberikan hasil yang menemukan dari sisi regulasi telah banyak diatur tentang integrasi data, tetapi masih ada sistem pencatatan dan pelaporan yang tumpang tindih. Kesimpulannya, hambatan koordinasi dan politik sektoral ego masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. Namun, dari dua penelitian tersebut terdapat pandangan yang berbeda dalam penerapan kebijakan Satu Data. Dari hasil penelitian yang pertama beranggapan bahwa dengan menggunakan teknologi digital pada kebijakan satu data akan mempermudah semua instansi dalam melakukan pelaporan terhadap instansi terkait. Sedangkan dari penelitian kedua, dengan menggunakan teknologi digital dalam penerapan kebijakan satu data akan berdampak pada sistem pencatatan yang tumpang tindih serta tidak sesuai antar instansi yang disebabkan adanya ego politik. Hasil analisis *software* VOSviewer berikut digunakan untuk mengidentifikasi suatu tren penelitian dengan memetakan



Gambar 1. VOSviewer

konsep-konsep utama dalam suatu domain, serta membantu untuk memahami perkembangan terbaru terhadap sebuah penelitian yang terdapat pada [Gambar 1](#).

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa kajian terkait dengan kebijakan publik memiliki keterkaitan dengan statistik dan numerikal data. Namun, dalam penelitian sebelumnya masih sedikit data yang menggunakan analisis VOSviewer. Maksud dan Tujuan dari penelitian ini guna menganalisis lebih lanjut akan penerapan kebijakan Satu Data di Kabupaten Sleman. Mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi keberlangsungan penerapan kebijakan satu data di Kabupaten Sleman ([Wulandari dkk., 2019](#)) Berdasarkan data yang didapat dari ([Primadhayanti, 2022](#)) yang berjudul *Implementation of Bojonegoro One Data Policy in Supporting Public Information Disclosure In Bojonegoro District, East Java Province* memberikan hasil penelitian bahwa pelaksanaan kebijakan Satu Data di Bojonegoro belum maksimal karena kurangnya koordinasi dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro. Namun, instansi terkait telah berupaya dengan mengadakan rapat koordinasi tentang penyamaan persepsi kebijakan Satu Data yang ada di Kabupaten Bojonegoro melalui para pelaksana kebijakan Satu Data.

Hasil penelitian [Marthalina \(2016\)](#) yang berjudul *Kebijakan Satu Peta* yang mendukung pembangunan nasional, beranggapan bahwa kebijakan Satu Data/Satu Peta memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pembangunan nasional. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah sangat terbantu dalam merumuskan perencanaan pembangunan secara terintegrasi sehingga tidak ada lagi terjadi tumpang tindih informasi. Dengan demikian, sangat dimungkinkan apabila Kabupaten Bojonegoro segera menerapkan kebijakan Satu Data maupun satu peta untuk menunjang kemudahan dalam aspek pembangunan infrastruktur maupun penguatan kapasitas pelayanan informasi yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro untuk yang lebih baik.

2. Metode

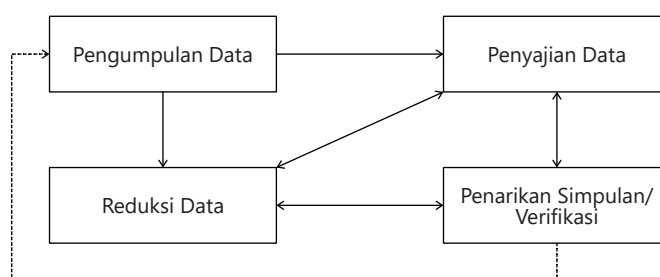
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut [Creswell \(2014\)](#), jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus merupakan metode untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang dianggap oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dianggap memudahkan penelitian ini dalam mengeksplorasi lebih dalam pemahaman untuk mengembangkan kebijakan satu data oleh pelayan publik di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Satu Data merupakan hal penting untuk pengambilan keputusan pemerintah, baik lokal maupun nasional ([Sekretariat Satu Data Indonesia & Kementerian PPN/Bappenas, 2021](#)). Namun, terdapat kelemahan terkait keterbatasan dan konsistensi data, serta sumber daya untuk pengumpulan dan pemeliharaan data ([Marthalina, 2016](#)). Hasil penelitian ini akan mengungkap proses kebijakan Satu Data dan mengetahui penerapan kebijakan satu data di Kabupaten Sleman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan menganalisis enam indikator pengembangan kebijakan yaitu: *agenda setting*, analisis masalah, rencana operasional, implementasi, *monitoring*, dan evaluasi ([Meutia, 2013](#)). Penelitian ini dimulai 20 Juli 2023 sampai 15 Januari 2024. Adapun Penelitian ini menerapkan teknik pada pengumpulan data ke dalam teknik pengumpulan data secara sekunder atau sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang dihimpun serta dianalisis dari berbagai sumber artikel ilmiah, media masa, dokumen peraturan daerah dalam penerapan kebijakan satu data dan jenis data sekunder lainnya. Detailnya, jenis pengumpulan data di atas telah diuraikan pada sub bab dan [Tabel 1](#).

Tabel 1. Sumber Artikel Ilmiah

Jenis Data	Sumber Data	Kebutuhan Data	Pengumpulan Data
Data Sekunder	Artikel Ilmiah	Analisis regulasi dalam penerapan Kebijakan satu data pada	Tinjauan Pustaka
Data Sekunder	Artikel Ilmiah	Analisis sekunder artikel ilmiah yang relevan dengan Kebijakan satu data	Tinjauan Pustaka
Data Sekunder	Dokumen Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	Analisis Penerapan Kebijakan satu data di Indonesia	Tinjauan Pustaka
Data Sekunder	Dokumen Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.6 Tahun 2020 tentang Satu Data Kabupaten Sleman.	Analisis sekunder regulasi serta penerapan kebijakan di Kabupaten Sleman	Tinjauan Pustaka

Sumber: Artikel Ilmiah. Data diolah. (2023)

Berdasarkan dari [Tabel 1](#), dapat diketahui bahwa sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang bertujuan dapat memenuhi kebutuhan data dalam mengungkapkan identifikasi permasalahan yang kemungkinan dapat terjadi dan strategi dalam menanggulangnya. Strategi penanggulangannya membuat

**Gambar 2.** Model Analisis Interaktif (Miles dkk., 2014)

kehadiran kebijakan Satu Data ini harus tepat sasaran dan diharap dapat memenuhi kebutuhan data pemerintah serta masyarakat. Selanjutnya pelaksanaan hasil analisis data yang terdapat pada [Gambar 2](#).

Analisis data pada penelitian dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pengumpulan data diambil dari literatur serta jurnal terdahulu yang sesuai dengan topik dalam penelitian. Setelah data terkumpul tahapan berikutnya mereduksi data dalam hal ini dilakukan penyederhanaan kata yang sulit dipahami serta mentransformasi data. Setelah tahapan reduksi dirasa cukup selanjutnya penyajian data yang mana diarahkan agar data yang didapat dari reduksi data dapat terorganisasikan, tersusun serta mudah dipahami. Pada tahapan terakhir yakni penarikan kesimpulan/verifikasi untuk mencari pemahaman makna dan keteraturan pada analisis data.

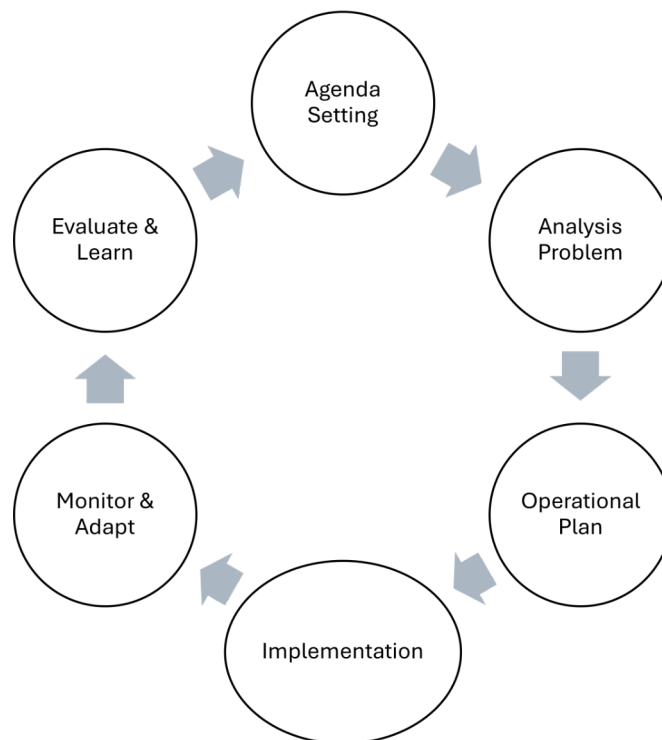
3. Hasil dan Pembahasan

Agar suatu kebijakan menjadi konsensus yang efektif, diperlukan model tujuan yang masuk akal untuk menunjukkan efektivitas kebijakan (Farikhah, 2020). Model dalam kebijakan ini berkaitan dengan aturan yang mengatur program dan prosedur, serta birokrasi memperhatikan keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing individu (DR. Taufiqurakhman, S.Sos., 2014). Sleman *Smart Regency* adalah aplikasi layanan yang memungkinkan pemerintah di Kabupaten Sleman untuk merespons secara cepat dan akurat, sehingga dapat diakses oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Sleman (Novriando, 2020).

Harapan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat diberikan ruang dalam aplikasi Sleman *Smart Regency*. Layanan tersebut meliputi layanan darurat, informasi dan pengaduan, layanan publik, data dan informasi, bisnis lokal dan mitra pemerintah daerah (Syafiqurrohman & Atmojo, 2023). Ada juga tab untuk mengunduh materi. Keadaan darurat meliputi layanan medis darurat, penyelamatan jiwa, kebakaran dan kekerasan. Informasi dan pengaduan meliputi pengaduan, statistik, pertanyaan dan klipng koran. Layanan publik meliputi layanan kelurahan dan kelurahan, mobil jenazah, layanan gabungan, PBB, E-SPTPD, saran informasi pembelajaran siswa *online* PPDB, biaya e-pasar, pemantauan dodoran siswa, layanan surat warga, E-IRTTP, Puskesmas Antrian (Aldiansyah & Winarsih, 2022). Lingkungan terkendali, perizinan *online*, antrean di rumah sakit daerah, izin praktik kedokteran, pendaftaran pelatihan, dan lain-lain.

Data dan informasi meliputi lokasi utama, produk utama, informasi demografis, realisasi anggaran, penawaran pekerjaan, harga komoditas, kualitas lingkungan, pendapatan daerah, lelang, jadwal konferensi, CCTV, informasi tata ruang rumah sakit Yogyakarta, investasi, termasuk rencana, peta tata ruang, survei dan informasi. membuka data. Acara Jogja meliputi acara pariwisata dan pendaftaran acara. Mitra Pemerintah Kota antara lain Inventarisasi Darah PMI, Baznas, *Case Tracking*, dan lainnya. Namun, jika melihat yang terjadi di lapangan, kebijakan Satu Data masih berada pada permasalahan yang menjadi penghambat, yaitu data yang cenderung tidak konsisten dan sulitnya masyarakat untuk mengakses pada institusi publik. Koordinasi antar institusi pemilik data dan data yang belum terstandar dinilai sebagai akar permasalahan dari kebijakan Satu Data ini.

Hadirnya *The Policy Cycle* diharapkan mampu menjadi jalan tengah atas permasalahan yang terjadi. *The Policy Cycle* merupakan salah satu model dari William Dunn yang digunakan dalam pengembangan kebijakan. Dalam model ini tidak hanya mempertimbangkan idealitas akan tetapi juga mempertimbangkan kerangka kerja paling banyak digunakan dan ditemukan dalam praktik. Menurut Edward (2001) terdapat 6 langkah dalam mengidentifikasi pengembangan



Gambar 3. The Stage of the Policy Cycle

kebijakan, yakni: *Agenda Setting, Analysis of Problem & Options Theory of Change, Design Intervention & Operational Plan, Implement, Monitor & Adapt, and Evaluate & Learn*. Pembahasan lebih lanjutnya dapat dilihat dari [Gambar 3](#).

3.1. *Agenda Setting* Satu Data Kabupaten Sleman

Adapun dalam penjelasannya *agenda setting* merupakan tahap yang digunakan dalam penyusunan agenda. Adapun penyusunan agenda akan mengandung banyaknya masalah kebijakan yang nantinya akan memerlukan respons serta pertimbangan dari permasalahan untuk dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Setelah melaksanakan *agenda setting*, tahapan berikutnya menganalisis masalah yang kemudian akan dibahas oleh para perumus atau pembuat kebijakan serta mencari cara terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut sebelum membuat rancangan kebijakan yang akan di adopsi dalam sebuah kebijakan ([Wahyuni dkk., 2022](#)). Selanjutnya menetapkan rencana operasional yang menargetkan pencapaian serta keberhasilan pada suatu kebijakan. Setelah memiliki rancangan operasional yang tepat, langkah berikutnya adalah penerapan kebijakan untuk dilaksanakan kepada instansi terkait untuk memobilisasi masyarakat. Apabila sudah dilaksanakan para pembuat kebijakan juga harus memonitor keberlangsungan kebijakan supaya tepat sasaran ([Tunggul Prasodjo, 2023](#)). Langkah akhir dari tahapan siklus kebijakan yaitu evaluasi untuk mengetahui perkembangan kebijakan yang telah dibuat supaya selalu *update* dan memastikan bahwa kebijakan tersebut meraih dampak yang diinginkan pembuat kebijakan. Selanjutnya dalam penerapan kebijakan satu data di Kabupaten Sleman yang berdasarkan model *The Stages of the Policy Cycle*, terdapat 6 (enam) uraian dinamika implementasi yang terjadi.

Pada dinamika *agenda setting* yang digunakan untuk merancang dalam pembuatan sebuah kebijakan tentunya pemerintah harus mengidentifikasi permasalahan yang sering muncul di dalam lingkup pemerintah maupun masyarakat. Keterkaitan definisi *agenda setting* dengan penelitian ini adalah terdapat banyaknya kebijakan-kebijakan yang belum tepat sasaran karena kurangnya data dan bukti yang diperoleh dengan akurat. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Sleman telah melakukan Bimtek Satu Data Indonesia untuk memperkuat sistematisa kebijakan Satu Data dengan tegas serta mempertimbangkan permasalahan yang akan terjadi kemudian ([Satyo, 2021](#)). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sleman juga harus membuat aturan tegas kepada para instansi yang terkait untuk patuh akan kebijakan dari pemerintah setempat yang bertujuan untuk dapat menyatukan visi dan misi supaya rancangan yang dibuat berjalan sesuai dengan rencana. Kebijakan Satu Data di Kabupaten Sleman yang seharusnya dapat menjadi fasilitas memungkinkan dalam membantu pemerintah menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Namun, masih banyak ditemui oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang masih bersikeras dalam mencari keuntungan pribadi. Tentunya hal ini akan menjadi penghambat dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, peranan masyarakat juga dinilai penting dalam mengawasi pejabat pemerintah yang menjalankan tugas tanpa menggunakan regulasi dan aturan yang jelas. Adanya kebijakan Satu Data ini juga dimaksudkan dapat menjadikan Kabupaten Sleman menjadi *Smart City* yang bersifat transparan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat.

3.2. Analisis Permasalahan Satu Data Kabupaten Sleman

Dinamika siklus kebijakan publik yang kedua, yaitu *analysis of problem* memiliki maksud dalam pengambilan keputusan untuk perumusan kebijakan, pemerintah harus memiliki data yang aktual tentang permasalahan yang sering terjadi untuk didiskusikan dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan tegas serta sesuai dengan sasaran ([City, 2021](#)). Sebelum terdapat rancangan kebijakan Satu Data, Sebagian besar instansi pemerintah masih menggunakan pengumpulan

data melalui hasil survei yang dinilai kurang akurat dalam mendapatkan informasi. Hal ini disebabkan karena proses pengumpulan data informasi menggunakan survei harus menunggu sehari-hari bahkan bisa mencapai berbulan-bulan. Karenanya, pemerintah mengambil langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan diselenggarakannya Forum Satu Data yang akan dikoordinasi oleh Bappeda Sleman serta Badan Pusat Statistik sebagai Pembina Data dan Dinas Kominfo sebagai Wali Data Utama yang didukung oleh unit kerja masing-masing OPD untuk menerapkan kebijakan Satu Data yang mudah diakses dan transparan (Neti Istimewa Rukmana, 2022). Banyaknya Kendala karena minimnya alat digital juga merupakan salah satu faktor yang menghambat berjalannya kebijakan Satu Data yang diterapkan di Kabupaten Sleman. Karena pada dasarnya kebijakan Satu Data ini merupakan bentuk terbaru pada skema kebijakan daerah yang menggunakan sistem secara digital untuk mengaksesnya. Dalam hal ini, pemerintah diharuskan meninjau secara langsung terkait fasilitas-fasilitas yang akan digunakan dalam menunjang penerapan kebijakan Satu Data. Dengan demikian pemerintah harus dengan cermat dan berhati-hati dalam mempersiapkan rancangan penerapan kebijakan Satu Data berbasis media digital. Karena pada musim pengadaan barang untuk persiapan menjalankan kebijakan Satu Data ditakutkan akan adanya kecurangan yang terjadi. Pemerintah juga harus mengambil sanksi tegas untuk meminimalisir terjadinya permasalahan.

3.3. Rencana Operasional Satu Data Kabupaten Sleman

Selanjutnya rencana operasional menjadi langkah awal pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan (Nurmandi dkk., 2023). Dalam perancangan rencana operasional, pembuat kebijakan harus memperhatikan tahapan satu dan dua pada siklus kebijakan. Setelah mendapatkan data dan permasalahan yang valid perancangan rencana operasional baru bisa dijalankan. Adapun perancangan rencana operasional harus memperhatikan beberapa aspek seperti: tujuan dibentuknya rencana operasional, pendanaan yang dibutuhkan, pelaksanaan rencana operasional, serta *monitoring* dan evaluasi. Apabila beberapa aspek tersebut memiliki *output* yang berbeda, dapat dimungkinkan atas kegagalan rencana yang akan diterapkan. Di Kabupaten Sleman, pemerintah telah menetapkan bahwasanya ingin menjadikan Kabupaten Sleman sebagai *smart city* yang ditujukan untuk kemudahan masyarakat dalam pengaksesan layanan pemerintah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sleman telah memulai penggunaan media digital berupa aplikasi untuk melakukan pelaporan suatu masalah yang berkaitan dengan pemerintah daerah (Budi Cahyana, 2022). Meskipun penerapan *smart city* di Kabupaten Sleman masih belum merata karena adanya kesenjangan usia yang signifikan terhadap era digital. Pemerintah memberikan solusi terhadap masyarakat yang memiliki kesenjangan teknologi dengan diadakannya sosialisasi perangkat digital untuk sekedar memberi pemahaman akan pelayanan pemerintah yang jauh lebih mudah diakses.

3.4. Implementasi Satu Data Kabupaten Sleman

Mengimplementasikan kebijakan Satu Data di Kabupaten Sleman disarankan untuk juga menjadi faktor dalam peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini disebabkan bahwa aplikasi hanyalah sebagai alat penunjang untuk mempermudah segala aspek kinerja. Pada dasarnya, hal yang paling penting dalam penerapan kebijakan Satu Data adalah terdapatnya sumber daya manusia pemerintah yang disiapkan guna kemajuan teknologi. Selain mempersiapkan pelayanan berbasis teknologi digital, pemerintah juga dituntut untuk mewujudkan adanya aspek *good governance* (Victorianus Sat Pranyoto, 2022). *Good governance* merupakan kegiatan dari pemerintah yang memiliki solidaritas dan bertanggung jawab serta memiliki suatu prinsip dalam demokrasi juga pasar yang efisien.

Sebelumnya juga perlu meningkatkan aspek komunikasi yang baik antar para pelaksana dan masyarakat, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk ditingkatkan kualitas yang sesuai dengan standar kebijakan (Mutiarin dkk., 2023). Untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam penerapan satu data di Kabupaten Sleman, pemerintah juga harus dapat mensosialisasikan kebijakannya terlebih dahulu serta menekankan cara yang lebih merata kepada masyarakat dan memberi motivasi lebih lanjut kepada para pelaksana kebijakan dengan memberi penghargaan serta sanksi kepada anggota yang telah bekerja dengan baik maupun anggota yang menyimpang dari peraturan yang ada.

3.5. *Monitoring* Satu Data Kabupaten Sleman

Dinamika siklus kebijakan *monitoring* juga merupakan hal yang penting dalam penerapan kebijakan Satu Data. Pada pengawasannya membutuhkan banyak peran masyarakat untuk memantau jalannya kebijakan supaya mengerti alur dari kebijakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Adapun tahapan pengawasan ini juga dimaksudkan untuk melihat perkembangan kebijakan Satu Data yang diterapkan di Kabupaten Sleman telah sesuai dengan standar kebijakan dan memiliki tujuan yang sesuai serta tepat sasaran (Wahyuni dkk., 2023). Apabila dalam proses pengawasan telah memahami sepenuhnya apa kebijakan yang harus diterapkan, selanjutnya melakukan pengadaptasian maupun pengaplikasian kebijakan yang telah sesuai dengan sasaran. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu mengkhawatirkan kegagalan dalam penerapan kebijakan apabila semua telah terintegrasi sesuai rencana. Di Kabupaten Sleman, sistem pemerintahannya telah dinilai berhasil dalam penerapan beberapa aplikasi media digital seperti pembayaran pajak melalui e-pajak dan e-retribusi yang memberikan kemudahan fasilitas kepada para masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan maupun pajak bangunan. Selain fasilitas pelayanan pembayaran pajak, juga terdapat aplikasi “Lapor Sleman” yang merupakan sistem aduan multi kanal (Lugas Subarkah, 2021). Penerapan tersebut tentunya memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat Sleman untuk taat dan patuh terhadap kewajiban sebagai masyarakat dalam bernegara. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan permasalahan pada aplikasi untuk meminimalisir kegagalan aplikasi seperti server penuh, aplikasi yang tidak *update*, serta tersebarnya data diri karena pengamanan aplikasi yang kurang memadai. Dengan mengoptimalkan aplikasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat menarik minat masyarakat dalam penggunaan aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.

3.6. Evaluasi Satu Data Kabupaten Sleman

Terakhir, pada dinamika evaluasi para pelaksana kebijakan harus benar-benar memperhatikan permasalahan yang muncul karena mencakup keseluruhan tahapan dari semua tahapan untuk mengerti akan adanya kesalahan yang terjadi dan harus segera mengatasi kesalahannya untuk demi kelancaran dan tercapainya target dalam penerapan sistem kebijakan Satu Data yang ada di Kabupaten Sleman. Selain mengevaluasi tahapan siklus kebijakan, pemerintah juga mengevaluasi para pelaku pelaksana kebijakan untuk tetap menjalankan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional kerja yang sudah disetujui (Cahyani & Winarni, 2019). Pemerintah juga mengharuskan para pelaku pembuat kebijakan untuk selalu memberikan laporan setiap bulannya untuk menjamin kualitas kebijakan yang sedang berjalan. Setelah melewati tahap evaluasi, pemerintah tidak diperbolehkan lepas tangan dengan kebijakan yang telah dibuat dan disepakati. Namun, pemerintah harus berupaya dalam pembuatan tim khusus yang menaungi kebijakan yang telah dilaksanakan serta tetap mencari dan mengolah data untuk tetap mempertahankan kualitas serta kapabilitas dari kebijakan satu data yang telah diterapkan agar selalu *update*

informasi guna dapat di akses oleh seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dari hasil penelitian Pengembangan Kebijakan Satu Data Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Sleman dengan menggunakan model The Stage of Policy Cycle dari William Dunn. Pada tahapan *agenda setting* dalam mengidentifikasi permasalahan yang sering muncul di dalam lingkup pemerintah maupun masyarakat., pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan peningkatan berupa kegiatan Bimtek Satu Data Indonesia untuk memperkuat sistematisa kebijakan Satu Data. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah mengambil langkah untuk dengan diselenggarakannya Forum Satu Data yang mana dikoordinasi oleh Bappeda Sleman serta menggandeng Dinas Kominfo dan Badan Pusat Statistik. Langkah awal dalam menjalankan suatu kebijakan, pemerintah Kabupaten Sleman merancang rencana operasional dengan membuat sistem pelayanan berbasis Media dan Teknologi. Meski demikian masyarakat tidak perlu khawatir akan kesulitan dalam penggunaan karena pemerintah akan memberikan solusi terhadap masyarakat yang memiliki kesenjangan teknologi dengan diadakannya sosialisasi perangkat digital untuk sekedar memberi pemahaman akan pelayanan pemerintah yang jauh lebih mudah diakses. Dalam penerapannya, Kabupaten Sleman telah mengadopsi aplikasi “Lapor Sleman” untuk melayani dan mengakomodir masyarakat terkait pelayanan pemerintah Kabupaten Sleman. Seiring dengan berjalannya kebijakan yang telah diterapkan pemerintah akan selalu memantau jalannya kebijakan supaya mengerti alur dari kebijakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan dan tepat sasaran. Pada tahapan akhir, pemerintah menghimbau untuk semua pelaku pembuat kebijakan memberikan laporan setiap bulannya untuk menjamin kualitas kebijakan yang sedang berjalan serta mempertahankan kualitas dan kapabilitas kebijakan Satu Data agar selalu *update*.

Referensi

- Aldiansyah, M. F., & Winarsih, A. S. (2022). Inovasi Pelayanan KTP Elektronik Melalui Aplikasi Temanggung Gandem pada Masa Pandemi COVID-19. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 14–30. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.272>
- Ardani, I., & Cahyani, H. S. H. (2022). Tantangan Kebijakan Satu Data Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 25(1), 52–60. <https://doi.org/10.22435/hsr.v25i1.4167>
- Arthur Glenn Maail. (2018). Understanding Barriers In The Implementation Of The One Data Policy In Indonesia: Insights From Health Data Journey Modelling. *ITU Journal: ICT Discoveries*, 2.
- Budi Cahyana. (2022). *Sleman Tingkatkan Pemanfaatan Jaringan Informasi Geospasial*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/11/03/512/1117444/sleman-tingkatkan-pemanfaatan-jaringan-informasi-geospasial>
- Cahyani, B. S., & Winarni, F. (2019). *Evaluation of District Integrated Administration Services (Paten) Policy in Depok Sleman District*. 1–9.
- Chandra, D. R., & van Hillegersberg, J. (2018). Governance of inter-organizational systems: A longitudinal case study of Rotterdam's port community system. *International Journal of Information Systems and Project Management*, 6(2), 47–68. <https://doi.org/10.12821/ijispm060203>
- City, S. (2021). *JURNAL NATAPRAJA: Kajian Ilmu Administrasi Negara*. 09(2), 131–147.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, dan Campuran*. Pustaka Belajar.
- Dr. Isnaini Rodiyah, M. S., Ilmi Usrotin Choiriyah, M. A., & Hendra Sukmana, M. K. (2022). *KEBIJAKAN PUBLIK*. UMSIDA Press.
- DR. Taufiqurakhman, S.Sos., M. S. (2014). *KEBIJAKAN PUBLIK PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Edward, M. (2001). *Social Policy, Public Policy — From Problem to Practice*. Allen&Unwin.
- Fariqhah, M. T. R. (2020). Implementation of Smart Governance Concept Policy in Bantul Regency. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 129. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7809>

- Farzali, E., Kanaan, G., Kanaan, R. K., & Atieh, K. (2012). E-government in Syria: Obstacles and interoperability framework. In *Handbook of Research on E-Government in Emerging Economies: Adoption, E-Participation, and Legal Frameworks* (pp. 212–236). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-0324-0.ch011>
- Fikri, R., Purnomo, E. P., Pribadi, U., & Binti Mohammad, N. (2023). *Technology Readiness of e-Government in the Use of Poverty Data for Social Assistance in Indonesia BT - HCI International 2023 Posters* (C. Stephanidis, M. Antona, S. Ntoa, & G. Salvendy (eds.); pp. 195–202). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36001-5_25
- Hamrun, H., Harakan, A., Prianto, A. L., & Khaerah, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government di Kabupaten Muna. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 64. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7808>
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3750>
- Khairunnisa, T., Nurmandi, A., Muallidin, I., & Kurniawan, D. (2022). *Analysis on Open Government in Southeast Asia During Pandemic BT - HCI International 2022 Posters* (C. Stephanidis, M. Antona, & S. Ntoa (eds.); pp. 389–400). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06391-6_50
- Khairunnisa, T., & Purnomo, E. P. (2020). Smart Urban Service: Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis dan Gelandangan Kota Yogyakarta. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 29–42.
- Kurniasih, D. (2022). *Pelayanan Publik Berbasis Digital*. Deepublish.
- Lugas Subarkah. (2021). *Punya Masalah dengan Layanan Publik di Sleman? Ini Cara Cepat Melaporkannya*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/12/25/512/1091708/punya-masalah-dengan-layanan-publik-di-sleman-ini-cara-cepat-melaporkannya>
- Marthalina. (2016). Kebijakan Satu Peta Dalam Mendukung Pembangunan Nasional. *Buletin Tata Ruang dan Pertanahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 5(2), 149–169.
- Maulidya, R., & Rozikin, M. (2022). Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 273. <https://doi.org/10.25157/dak.v9i2.7884>
- Meutia, I. F. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*.
- Miles, M.B., Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publication.
- Mulyanto, D. H. (2020). The Quality In Electronic Services Jogja City Government: In Case E-KTP. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 104. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7814>
- Mutiarin, D., Wahyuni, H., Syakran, N., Ismail, A., & Kumorotomo, W. (2023). *Social Media in Support of Indonesia's One Data Interoperability Process for Implementing Data Governance Policies*. 03022.
- Neti Istimewa Rukmana. (2022). *Bupati Sleman Luncurkan Bimtek Operator Sistem Satu Data UMKM*. https://jogja.tribunnews.com/2022/08/02/bupati-sleman-luncurkan-bimtek-operator-sistem-satu-data-umkm#google_vignette
- Novriando, A. (2020). Efektivitas “Jogja Smart Service” Terhadap Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 68–75.
- Nurmandi, A., Wahyuni, H., Guillamón, M. D., Salahudin, S., & Muallidin, I. (2023). Social Media Use for Public Policy Making Cycle: A Meta-Analysis. *Electronic Government*, 19(2), 123–145. <https://doi.org/10.1504/EG.2023.10044828>
- Primadhayanti, G. (2022). *Implementasi Kebijakan Satu Data Bojonegoro dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur* [Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/9940/>
- Purnama, I. K. E., Ariastita, P. G., Handayani, K. D. M. E., & Nugroho, S. M. S. (2018). Penerapan E-Commerce untuk Penguatan UMKM Berbasis Konsep One Village One Product di Kabupaten Karangasem. *Sewagati: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2). <https://journal.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/312>
- Sekretariat Satu Data Indonesia & Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Satu Data Indonesia*.
- Rizki, R. A., & Andriyus, A. (2023). Digital Government in Handling Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Pekanbaru City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 22(1), 114–123. <https://doi.org/10.35967/njip.v22i1.457>
- Satyo. (2021). *Sistem Satu Data untuk Kemudahan Pengelolaan Data*. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/542109/sistem-satu-data-untuk-kemudahan-pengelolaan-data?show=>
- Setiawan, H., & Ikhsanditya, F. (2020). Gerakan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Inovasi Pelayanan Lukadesi (Keluarga Berduka Desa Siaga) di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(1), 38. <https://doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7853>
- Syafiqurrohman, A., & Atmojo, M. E. (2023). Mengarusutamakan Pemerintahan Cergas melalui Aplikasi SiBakul Jogja selama Masa Pandemi COVID-19. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 22(1), 33–46. <https://doi.org/10.35967/njip.v22i1.395>
- Tunggul Prasodjo. (2023). *Pelayanan Publik Era Digital* (L. Murdi (ed.)). CV. Literasi Nusantara Abadi.

- Victorianus Sat Pranyoto. (2022). *Sleman Berkomitmen Wujudkan "Good Governance" Hingga Desa*. <https://jogja.antaranews.com/berita/319315/sleman-berkomitmen-wujudkan-good-governance-hingga-desa>
- Wahyuni, H., Mutiarin, D., Kumorotomo, W., Pribadi, U., & Ismail, N. S. A. (2023). Maturity of Employment Data Interoperability in Supporting One Employment Data at the Ministry and Regional Government Level. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 14(3), 326–346. <https://doi.org/10.18196/jsp.v14i3.325>
- Wahyuni, H., Pribadi, U., & Prastya, D. E. (2022). The Success of E-government as a Public Service System in South Bengkulu Regency. *Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities*, 4(3), 221–236. <https://doi.org/10.31258/ijesh.4.3.221-236>
- Wicaksono, B. (2016). Sistem Operasional Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Sebagai Modal Pelayanan Sipil Dinas Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1). <https://doi.org/10.35967/jipn.v13i1.3219>
- Widodo, S. (2017). Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Wilayah (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(3), 166–172. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017.003.03.2>
- Wulandari, W., Suranto, & Priyo Purnomo, E. (2019). Collaborative Government dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 4(1), 13–28. <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.13-28>